



Masyarakat Miskin Kecanduan Bantuan

■ Pemkot Siapkan Skema Baru Pengganti KMS

(KMS) Harus direvisi lagi dengan membuat program baru yang membuat masyarakat tidak kecanduan bantuan," bebernya.

Heroe Poerwadi
Wakil Wali Kota Yogyakarta

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota Yogyakarta berencana meninjau ulang program Kartu Menuju Sehat (KMS). Wakil Wali Kota Heroe Poerwadi menjelaskan, saat ini KMS sudah tidak memiliki arti penting.

"Sekolah sekarang tidak bayar. Apalagi kuota KMS untuk diterima di sekolah sudah tidak ada. Semua dinilai berdasarkan rumah dan sekolah. Kesehatan semua ter-cover BPJS dan rencananya, 2019 kami yang membayar tur pasien kelas III. Makanan KMS sudah tidak terlalu penting," jelasnya dalam Konsultasi Publik, di Ruang Bima Balai Kota, Selasa (6/2). Heroe menyatakan telah melakukan pembicaraan di internal Pemkot untuk

memperbaiki program tersebut. Pihaknya berencana memberdayakan penerima KMS. Walau pada kenyataannya tidak semua penerima KMS bisa diberdayakan.

"KMS ada tiga, KMS 1 untuk fakir miskin yang mau tidak mau harus dibantu, karena tidak bisa mandiri. Sementara KMS 2 dan 3 adalah miskin dan hampir miskin yang sebenarnya bisa kita berdayakan," tegasnya.

Heroe mengungkapkan, tidak mudah menaikkan status warga dari miskin menjadi tidak miskin. Hal tersebut karena warga ingin tetap mendapatkan kurungan bantuan dari Pemkot.

● ke halaman 19

KONSULTASI

- Para narasumber tampil dalam Konsultasi Publik di Ruang Bima, Balai Kota, Yogyakarta, Selasa (6/2).



TRIBUNJOGJA/KURNIAWATI, BEKATAH

Masyarakat Miskin Kecanduan Bantuan

● Sambungan Hal 13

1. "(KMS) Harus direvisi lagi dengan membuat program baru yang membuat masyarakat tidak kecanduan bantuan," bebernya.
- 2.
- 3.
- 4.
5. Heroe menegaskan, bahwa yang tidak lagi memiliki peran adalah program KMS.

Sementara warga yang menerima KMS masih akan mendapatkan perhatian dari Pemkot.

"Tapi bentuknya tidak lagi seperti sekarang (KMS). Kita akan membuat road map. Jadi orang kategori apa dibantu berapa lama agar mandiri. Kita siapkan sampai mereka bisa mandiri," katanya.

Kaji parameter

Sementara itu, Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas

Sosial Kota Yogyakarta, Bejo Suwarno mengatakan pihaknya telah melakukan kajian untuk melakukan revisi beberapa poin yang tertuang dalam KMS.

"Masih mengkaji parameternya. Di antaranya penghasilan yang awalnya minimal Rp300 ribu jadi Rp400 ribu," ungkapnya.

Ia juga mengatakan bahwa sekolah saat ini juga tidak masuk dalam manfaat

KMS, sementara kondisi rumah yang disebutkan beralaskan tanah dan memiliki dinding anyaman bambu di Kota Yogyakarta sudah sangat jarang.

"Kami akan presentasikan ini di Komisi D" tuturnya.

Saat ini terdapat 17.253 KK penerima KMS yang terdiri dari 16 KK kategori KMS 1, 4.781 KK kategori KMS 2, dan 12.456 KK kategori KMS 3. (kur)

Yogyakarta,

Data Ulang agar Tepat Sasaran

KETUA Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Agung Damar Kusumandaru mendukung penuh rencana Pemerintah Kota untuk merevisi program Kartu Menuju Sehat (KMS).

"Memang program KMS sudah lama dan banyak program dari pusat yang

menyerupai KMS sudah banyak. kami mengapresiasi gagasan tersebut," terangnya, Selasa (6/2).

Ia menyarankan, agar Pemerintah Kota terlebih dahulu melakukan penda-

● ke halaman 19

Data Ulang agar Tepat Sasaran

● Sambungan Hal 13

taan warga miskin dan rentan miskin. Hal tersebut di-

nilainya sangat penting, agar revisi program KMS tersebut dapat tepat sasaran.

"Pemkot bisa menyajikan data valid masyarakat miskin dan rentan miskin, sehingga program pengganti KMS bisa lebih maksimal dalam

menanggulangi kemiskinan di Kota Yogyakarta," tambahnya.

Agung mencontohkan, program pemberdayaan yang bisa dilirik Pemerintah Kota adalah layanan jasa dan juga bidang pariwisata. Kota Yogyakarta merupakan kota ju-

jukan wisatawan yang bisa menjadi peluang warga Yogyakarta untuk bisa hidup layak dan mandiri.

"Bisa diadakan kursus atau pelatihan untuk mulai memberdayakan mereka," tuturnya. (kur)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005